

Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Luluk Desva Fitriah, Diah Hari Suryaningrum
Program Studi Akuntansi, UPN "Veteran" Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-04-03

Revised : 2023-04-30

Accepted, 2023-05-04

Keywords:

Desentralisasi Fiskal,
Ketimpangan Pendapatan
Daerah,
Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi penelitian adalah pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian berjumlah 15 pemerintah provinsi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) dengan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi mempengaruhi ketimpangan pendapatan daerah. Implikasi dari penelitian ini adalah desentralisasi fiskal yang sudah berjalan perlu dioptimalkan. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan pendapatan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, diikuti oleh ketimpangan pendapatan yang tinggi

This study aims to examine and prove the effect of fiscal decentralization on regional income inequality with economic growth as a mediating variable. This study is quantitative. The research population is provincial governments in Indonesia in 2017-2021. Sample selection using purposive sampling techniques. The research sample amounted to 15 provincial governments. Data analysis technique in this study using Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) with WarpPLS 7.0 software. The results showed that fiscal decentralization has no effect on regional income inequality. Fiscal decentralization affects economic growth. Economic growth affects regional income inequality. Fiscal decentralization with economic growth as a mediating variable affects regional income inequality. The implication of this research is fiscal decentralization that has been running needs to be optimized. This is to realize equitable distribution of regional income and increase economic growth. In addition, the government needs to pay special attention to areas that have high economic growth rates. However, it is followed by a high income inequality.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Diah Hari Suryaningrum,

Program Studi Akuntansi, UPN "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur

Email Korespondensi: diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id

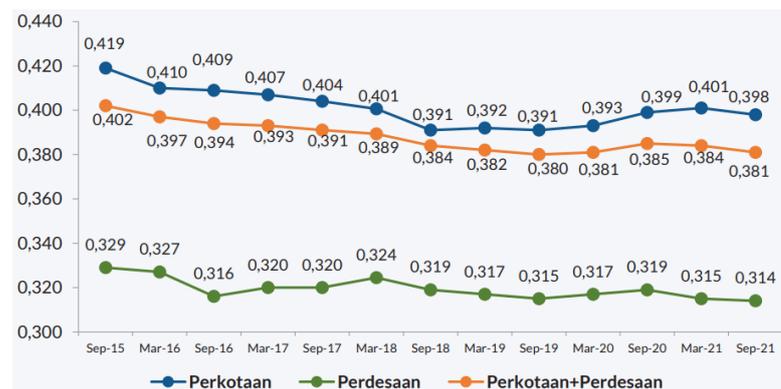
Pendahuluan

Indonesia yang terletak di kawasan tropis mempunyai sumber kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam dapat menambah pendapatan bagi negara sehingga meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat (Haryanti, 2019). Jika suatu negara sejahtera maka terdapat kenaikan pendapatan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Hutagalung & Batubara, 2021). Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik pada suatu wilayah (Alisjahbana & Akita, 2020). Ketika pertumbuhan ekonomi naik, ketimpangan pendapatan juga semakin tinggi. Teori Kuznets (1955) mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Salah satu fokus yang ingin dicapai seluruh bangsa di dunia adalah pengurangan ketimpangan. Hal ini dimuat pada *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pengurangan ketimpangan merupakan target SDGs nomor sepuluh (SDGs, 2017). Ketimpangan merupakan indikator penting pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan yaitu keadaan perbedaan kemakmuran ekonomi si kaya dengan si miskin dan diukur dari perbedaan pendapatan (Roy et al., 2019). Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan, digunakan indeks gini. Indeks gini yang besar berimplikasi pada buruknya distribusi

pendapatan dan sebaliknya (Rachmawati et al., 2021).

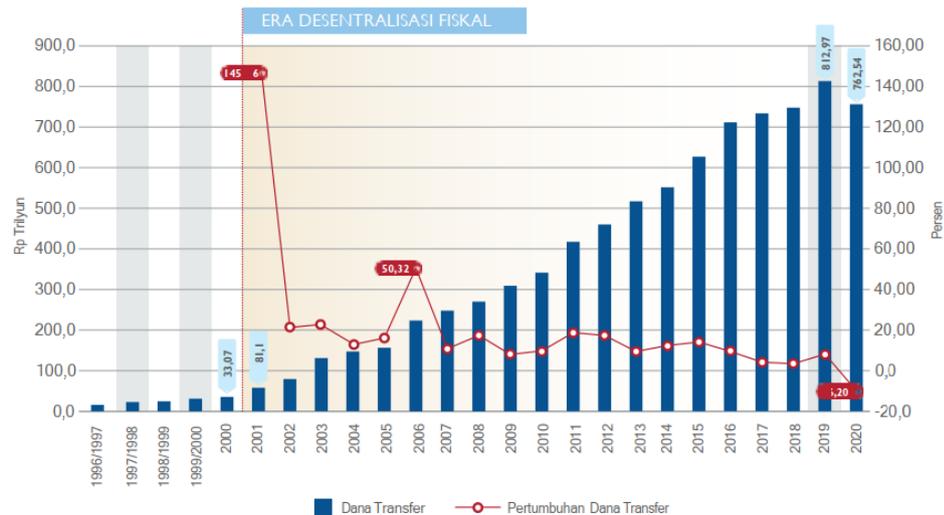
Berdasarkan gambar 1, indeks gini Indonesia sebagai ukuran ketimpangan dari tahun ke tahun selalu berubah. Secara nasional, angka indeks gini mengalami penurunan. Pada September 2015 nilai indeks gini sebesar 0,402 menjadi 0,381 pada September 2021. Akan tetapi, indeks gini mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Ketimpangan pendapatan yang tinggi justru terjadi di perkotaan (Taresh A et al., 2021). Indeks gini tiap provinsi di Indonesia berbeda. Data indeks gini bulan September tahun 2021 berdasarkan BPS (2022b) pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indeks gini paling besar yaitu 0,436. Sementara indeks gini paling kecil yaitu 0,247 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini berarti tingkat ketimpangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi sedangkan di Kepulauan Bangka Belitung cukup rendah.



Gambar 1. Perkembangan Indeks Gini, September 2015–September 2021
Sumber: BPS (2022d)

Untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, Indonesia memulai desentralisasi politik, administrasi dan fiskal pada tahun 2001. Desentralisasi adalah proses pendelegasian tanggung jawab dan wewenang level atas ke level bawah (Trisaningsih & Ariadi, 2022). *Grand design* desentralisasi fiskal Indonesia telah dirumuskan untuk implementasi desentralisasi fiskal (Puspita et al., 2021:11). Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus ditinjau sebagai suatu sistem yang menyeluruh. Kondisi minimal yang diperlukan oleh daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, misalnya pemerintah daerah memiliki kekuasaan yang cukup untuk menghimpun penerimaan dan pengeluaran.

Teorema desentralisasi Oates (1972) menyatakan bahwa di setiap level pemerintahan akan berupaya untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial dari daerahnya masing-masing dengan optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal juga bisa menimbulkan ketimpangan pendapatan dan tidak meratanya pengoptimalan sumber daya ekonomi yang ada di daerah. Padahal tujuan desentralisasi adalah pemerataan dan kesejahteraan seluruh daerah (Purbadharmaja et al., 2019). Oleh karena itu, pemerintah pusat mentransfer dana ke pemerintah daerah (Sefira & Budiwitjaksono, 2022).



Keterangan: 1996/1997 - 1999/2000: NK dan APBN; 2000 - 2003 : PAN; 2004-2020 LKPP

Gambar 2. Perkembangan Dana Transfer Tahun 1996-2020

Sumber: Puspita et al. (2021:17)

Perkembangan dana transfer dari tahun ke tahun jumlahnya makin besar. Hal ini tercermin pada gambar 2. Gambar 2 menjelaskan bahwa awal diberlakukannya desentralisasi fiskal pada tahun 2001 terdapat kenaikan dana transfer yang tinggi sebesar 145,06%. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selama dua dekade, mengalami peningkatan signifikan pada dana transfer. Dana transfer tahun 2019 sebesar Rp812,97 sedangkan tahun 2001 sebesar Rp81,05 triliun. Akan tetapi, pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19 yaitu sebesar Rp762,54 triliun (Puspita et al., 2021:17). Transfer sumber daya keuangan ke daerah dalam jumlah signifikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Hal ini tercermin dalam gambar 1 dan gambar 2.

Terdapat inkonsistensi penelitian terdahulu mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian menurut Triyono et al. (2021) dan Rachmawatie (2021) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh pada ketimpangan pendapatan secara positif dan signifikan. Sementara itu, hasil penelitian Bojanic & Collins (2021) dan Hanifah et al. (2020) desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang berarti ketimpangan pendapatan bisa dikurangi dengan adanya desentralisasi fiskal. Sementara itu, berdasarkan penelitian Roy et al. (2019) desentralisasi fiskal tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan daerah. Sementara itu, temuan dari penelitian terbaru yang dilakukan Hung & Thanh (2022) menyatakan desentralisasi fiskal berpengaruh pada ketimpangan pendapatan dengan model non-linier.

Alasan dipilihnya lokasi objek penelitian pemerintah provinsi di Indonesia karena lingkungannya yang lebih luas. Selain itu, wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, wilayah yang dibagi menjadi lima kepulauan besar, wilayah yang dipisahkan oleh lautan. Tentunya memiliki karakteristik dan perbedaan potensi daerah. Selain itu, pemerintah provinsi berada di daerah tingkat I dan terdapat daerah – daerah khusus serta daerah istimewa.

Dengan adanya fenomena dan fakta yang sudah dideskripsikan, maka penting dilakukan kembali penelitian mengenai model non-linier desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan variabel mediasi yaitu pertumbuhan ekonomi sejalan dengan riset Triyono et al. (2021) dengan lokasi penelitian dan periode yang berbeda. Penelitian dengan model non-linier masih jarang dilakukan di Indonesia. Analisis data menggunakan *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan pendekatan non-linier. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi.

Kajian Teori

Teorema Desentralisasi Oates

Elemen kunci teorema desentralisasi Oates adalah pandangan tentang cara kerja sektor publik. Lembaga pemerintah sebagai pemelihara kepentingan publik akan berupaya memaksimalkan kesejahteraan sosial (Oates, 1972). Dalam otonomi daerah, setiap tingkat pemerintahan akan berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dari daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan untuk mengelola daerahnya dengan optimal. Pada aturan barang publik yang pola konsumsinya kurang dari lingkup nasional, desentralisasi menawarkan beberapa peluang potensial yang penting untuk keuntungan dan kesejahteraan sosial. Untuk barang publik lokal, pemerintah daerah dapat menyediakan tingkat keluaran publik yang memenuhi permintaan penduduk di tingkat masing-masing.

Teori Kuznets

Kuznets (1955) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Tingginya pertumbuhan ekonomi maka kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya semakin besar. Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan cenderung semakin membaik.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah proses pendelegasian tanggung jawab dan wewenang level atas ke level bawah (Trisnaningsih & Ariadi, 2022). Desentralisasi fiskal memerlukan pengalihan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat ke unit-unit lokal, seperti mengalokasikan pengeluaran atau mengatur penerimaan (Hung & Thanh, 2022). Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan aspek keuangan kepada pemerintah daerah yang terdapat dua hal saling berkaitan yaitu pembagian tanggung jawab pengeluaran dan sumber pendapatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten serta keleluasaan pemerintah daerah untuk menentukan pengeluaran dan penerimaannya. Pelaksanaan desentralisasi sebagai wujud otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber keuangan daerah untuk membiayai urusan daerah itu sendiri (Sutapa & Miati, 2018). Desentralisasi fiskal diukur dengan indikator. Indikator desentralisasi fiskal menurut Hung & Thanh (2022) antara lain:

a. Pengeluaran yang dibiayai sendiri (X1)

Pengeluaran yang dibiayai sendiri bersumber dari pendapatan daerah sendiri. Pengeluaran rutin merupakan belanja rutin yang dibiayai dari pendapatan daerah sendiri (BPS, 2022c). Pengukuran indikator ini dengan skala rasio. Menurut Gemmell et al. (2013) diukur dengan pengeluaran pemerintah provinsi dikurangi hibah dari pemerintah lain. Kemudian dibagi dengan pengeluaran seluruh pemerintah provinsi.

b. Belanja langsung (X2)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja langsung dianggarkan langsung dengan program pemerintah daerah. Pengukurannya menggunakan skala rasio. Menurut Gemmell et al. (2013) diukur dengan selisih pengeluaran pemerintah provinsi dengan belanja transfer. Lalu dibagi dengan pengeluaran seluruh pemerintah provinsi.

c. Pendapatan Asli Daerah/PAD (X3)

Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri merupakan definisi dari Pendapatan Asli Daerah (Sari et al., 2018). Pengukurannya dengan skala rasio. Menurut Gemmell et al. (2013) dan Hung & Thanh (2022) diukur dengan PAD pajak ditambah PAD bukan pajak. Lalu dibagi dengan penerimaan seluruh pemerintah provinsi.

d. Dana bagi hasil dan pendapatan otonom (X4)

Dana bagi hasil yaitu bagian daerah atas penerimaan negara yang berasal dari daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pendapatan otonom dihasilkan dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri (Sari et al., 2018). Pengukurannya dengan skala rasio. Menurut Gemmell et al. (2013) diukur dengan menjumlahkan pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak serta bagi hasil pajak. Setelah itu dibagi dengan penerimaan seluruh pemerintah provinsi.

e. Pajak daerah (X5)

Pajak daerah adalah kontribusi wajib masyarakat untuk kemakmuran rakyat yang digunakan dalam pembangunan daerah dan infrastruktur (Kasih & Sulistyowati, 2022).

Pengukurannya dengan skala rasio. Menurut Stegarescu (2005) diukur dengan pajak daerah dibagi dengan pajak seluruh pemerintah provinsi.

Ketimpangan Pendapatan Daerah

Ketimpangan pendapatan adalah tolak ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan dari kecenderungan ketimpangan pendapatan terjadi di tingkat perkotaan, pedesaan, nasional, dan kawasan provinsi di Indonesia (Khoirudin & Musta'in, 2020). Pengukuran ketimpangan pendapatan daerah menggunakan indeks gini atau rasio gini (BPS, 2022a). Indeks gini menggunakan skala numerik dan berkisar antara 0 hingga 1. Semakin besar ketimpangan pada indeks gini nilainya juga semakin besar, yang artinya ekonomi pada kelompok di daerah tersebut semakin lebar.

Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Yasin (2020) yaitu sebagai proses perubahan yang berkesinambungan pada keadaan perekonomian suatu negara yang menjadi lebih baik pada rentang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produksi barang dan jasa (Amalia & Akbar, 2022). Faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Hung & Thanh (2022) antara lain:

a. Produk Domestik Regional Bruto/PDRB (Z1)

Laju pertumbuhan ekonomi berguna untuk mengetahui pertumbuhan produksi waktu tertentu di suatu daerah. PDRB yang digunakan atas dasar harga konstan (Rifai & Priono, 2022). Pengukuran indikator ini dengan skala rasio. Berdasarkan Triyono et al. (2021) diukur dengan selisih PDRB tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya. Lalu dibagi PDRB tahun sebelumnya.

b. Keterbukaan perdagangan (Z2)

Keterbukaan perdagangan berperan terhadap keterbukaan ekonomi agar pertumbuhan terjadi secara cepat (Pertiwi et al., 2019). Pengukuran indikator ini dengan skala rasio. Menurut Hung & Thanh (2022) diukur dengan total ekspor dan impor dibagi Produk Domestik Regional Bruto.

c. Penanaman Modal Asing (Z3)

Penanaman modal usaha di Indonesia oleh investor asing merupakan definisi Penanaman Modal Asing (Ramli & Karmila, 2022). Pengukuran indikator ini dengan skala rasio. Menurut Hung & Thanh (2022) diukur dengan angka realisasi penanaman modal asing dibagi Produk Domestik Regional Bruto.

d. Pengeluaran pemerintah (Z4)

Pengeluaran pemerintah ialah distribusi anggaran yang dibuat setiap tahunnya ke berbagai sektor dan program guna kesejahteraan rakyat (Islamiah et al., 2021). Pengukuran indikator ini dengan skala rasio. Menurut Hung & Thanh (2022) diukur dengan angka pengeluaran pemerintah dibagi Produk Domestik Regional Bruto.

e. Investasi pemerintah (Z5)

Investasi pemerintah adalah pemakaian anggaran pemerintah yang berguna dalam membiayai program kegiatan dengan jangka pendek ataupun jangka panjang, permanen atau non permanen (Islamiah et al., 2021). Penyertaan modal pemerintah daerah mencerminkan investasi pemerintah (Buana et al., 2018). Pengukuran indikator ini dengan skala rasio. Menurut Hung & Thanh (2022) diukur dengan angka investasi pemerintah dibagi Produk Domestik Regional Bruto.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Objek penelitian adalah desentralisasi fiskal, ketimpangan pendapatan daerah, serta pertumbuhan ekonomi. Pemerintah provinsi Indonesia sejumlah 34 provinsi pada tahun 2021 sebagai populasi pada penelitian ini. Sampel penelitian berjumlah 15 provinsi. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Kriteria dalam penentuan sampel antara lain:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2021	34
2.	Pemerintah provinsi yang memiliki data tidak lengkap tahun 2017-2021 terkait pengukuran variabel	(19)
	Sampel pemerintah provinsi	15
	Jumlah data tahun 2017-2021	75

Sumber: Hasil olahan peneliti

Penelitian ini menggunakan variabel independen (X) yaitu desentralisasi fiskal yang diukur dengan indikator. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan daerah yang diukur dengan indeks gini. Variabel mediasi (Z) pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data ini didapat dari portal data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, publikasi Badan Pusat Statistik pusat dan tiap provinsi, serta portal data perdagangan Kementerian Perdagangan. Pengumpulan data dengan cara mengakses website. *Structural Equation Modeling Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan perangkat lunak WarpPLS 7.0 merupakan analisis data pada riset ini. Terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain outer model dan inner model. Tahap outer model menguji validitas dan reliabilitas suatu data (Sholihin & Ratmono, 2021:22). Terdapat 2 jenis pengujian validitas, yaitu validitas konvergen (*loading factor* dan AVE) dan validitas diskriminan (korelasi antar variabel laten dan akar AVE). Metode uji reliabilitas yaitu nilai diatas 0,7 untuk *composite reliability* dan *cronbach's alpha* (Sholihin & Ratmono, 2021:13). Untuk melihat hubungan antar variabel digunakan tingkat signifikansi 5%.

Hasil dan Pembahasan

Pengukuran validitas konvergen dengan indikator reflektif yaitu *loading* indikator di atas 0,70. Selain itu, nilai p harus signifikan dengan nilai $<0,05$ (Sholihin & Ratmono, 2021:85). Berdasarkan tabel 2, pada tahap 1 nilai *loading* yang bercetak hitam tebal memiliki nilai dibawah 0,7. Selain itu, nilai p tidak signifikan. Hal ini berarti indikator tersebut tidak memenuhi kriteria pengukuran dan dilakukan eliminasi. Indikator yang dieliminasi antara lain Z1, Z3, dan Z4. Selanjutnya, dilakukan uji validitas konvergen *loading factor* tahap 2. Pada tahap ini, seluruh indikator sudah lolos kriteria uji validitas konvergen dengan nilai *loading* lebih dari 0,7 dan nilai p signifikan.

Tabel 2. Uji Validitas Konvergen *Loading Factor*

Indikator	Tahap 1			Tahap 2		
	Nilai <i>Loading</i>	P value	Hasil	Nilai <i>Loading</i>	P value	Hasil
X1	0.987	<0.001	Valid	0.987	<0.001	Valid
X2	0.994	<0.001	Valid	0.994	<0.001	Valid
X3	0.996	<0.001	Valid	0.996	<0.001	Valid
X4	0.995	<0.001	Valid	0.995	<0.001	Valid
X5	0.995	<0.001	Valid	0.995	<0.001	Valid
Y	1.000	<0.001	Valid	1.000	<0.001	Valid
Z1	0.174	0.057	Tidak Valid			
Z2	0.914	<0.001	Valid	0.911	<0.001	Valid
Z3	-0.091	0.211	Tidak Valid			
Z4	-0.397	<0.001	Tidak Valid			
Z5	0.843	<0.001	Valid	0.911	<0.001	Valid

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0

Langkah selanjutnya dilakukan uji validitas konvergen menggunakan *Average Variance Extracted* dengan persyaratan nilainya di atas 0,5 (Sholihin & Ratmono, 2021:45). Hasil uji validitas

konvergen AVE, seluruh variabel telah lolos validitas konvergen dengan AVE lebih besar dari 0,5. Variabel desentralisasi fiskal (X) dengan nilai 0,987. Variabel ketimpangan pendapatan daerah (Y) dengan nilai 1,000. Variabel pertumbuhan ekonomi (Z) dengan nilai 0,830.

Tabel 3. Uji Validitas Diskriminan *Cross-Loadings*

Indikator	Tahap 1				Tahap 2			
	X	Y	Z	Hasil	X	Y	Z	Hasil
X1	0.987	0.012	-0.100	Valid	0.987	0.015	-0.042	Valid
X2	0.994	-0.005	0.120	Valid	0.994	-0.010	0.056	Valid
X3	0.996	-0.004	-0.071	Valid	0.996	0.000	-0.034	Valid
X4	0.995	-0.002	0.122	Valid	0.995	-0.007	0.054	Valid
X5	0.995	0.000	-0.072	Valid	0.995	0.003	-0.034	Valid
Y	0.000	1.000	0.000	Valid	0.000	1.000	0.000	Valid
Z2	1.372	-0.080	0.911	Tidak valid				
Z5	1.372	0.080	0.911	Valid	0.000	0.000	1.000	Valid

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0

Selanjutnya dilakukan uji validitas diskriminan yang diukur dengan *cross-loadings* dan akar kuadrat *Average Variance Extracted* (Sholihin & Ratmono, 2021:45). Berdasarkan tabel 3, pada tahap 1 indikator Z2 tidak memenuhi uji validitas diskriminan. Hal ini karena *cross loadings* lebih kecil dari variabel lainnya. Oleh karena itu, indikator Z2 dieliminasi dari model. Setelah indikator Z2 dieliminasi, pada tahap 2 semua indikator telah lolos uji validitas diskriminan *cross loadings* dengan nilai lebih besar dari variabel lainnya. Untuk menguji validitas diskriminan dilihat pada akar AVE dengan persyaratan kolom diagonal lebih tinggi dari kolom selain diagonal (Sholihin & Ratmono, 2021:205). Berdasarkan tabel 4, akar kuadrat AVE tiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi. Hal ini berarti seluruh variabel memiliki validitas diskriminan yang baik. Langkah selanjutnya dilakukan uji reliabilitas.

Tabel 4. Uji Validitas Diskriminan Akar AVE

Variabel	X	Y	Z
X	0.993	0.289	0.786
Y	0.289	1.000	0.338
Z	0.786	0.338	1.000

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0

Tabel 5 menunjukkan bahwa *composite reliability* desentralisasi fiskal (X) dengan nilai 0,997. *Composite reliability* ketimpangan pendapatan daerah (Y) dengan nilai 1,000. *Composite reliability* pertumbuhan ekonomi (Z) dengan nilai 1,000. Sementara itu, *cronbach's alpha* desentralisasi fiskal (X) dengan nilai 0,997. *Cronbach's alpha* ketimpangan pendapatan daerah (Y) dengan nilai 1,000. *Cronbach's alpha* pertumbuhan ekonomi (Z) dengan nilai 1,000. Oleh karena itu, seluruh variabel dikatakan reliabel karena memenuhi persyaratan uji reliabilitas dengan nilai di atas 0,7.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Composite reliability</i>	<i>Cronbach's alpha</i>	Hasil
X	0.997	0.997	Reliabel
Y	1.000	1.000	Reliabel
Z	1.000	1.000	Reliabel

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0

Perhitungan inner model yaitu nilai koefisien determinasi (*R-squared*) 0,75 adalah substansial. Dikatakan moderat jika nilainya 0,50. Dikatakan lemah jika nilainya 0,25. Relevansi prediktif dengan nilai *Q-squared* lebih besar dari nol (Sholihin & Ratmono, 2021:18). Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *R-squared* 0,118 yang artinya variabel ketimpangan pendapatan daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal (X) dengan persentase 11,8% sedangkan 88,2% dijelaskan variabel lain di

luar penelitian. Nilai *R-squared* 0,617 artinya variabel pertumbuhan ekonomi (Z) dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal (X) sebesar 61,7% sedangkan 38,3% dijelaskan variabel lain di luar penelitian. Nilai *Q-squared* variabel Y sebesar 0,128 sedangkan nilai *Q-squared* variabel Z sebesar 0,560. Artinya variabel memiliki validitas prediktif yang baik dimana nilainya di atas 0.

Tabel 6. Nilai *R-Squared* dan *Q-Squared*

Variabel	<i>R-squared</i>	<i>Q-squared</i>
X	-	-
Y	0.118	0.128
Z	0.617	0.560

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0

Untuk mendeskripsikan arah hubungan antar variabel, dapat dilihat pada nilai P dengan tingkat signifikansi 5%. Untuk mengetahui model non-linier ataupun linier antar variabel laten, dapat dilihat pada plot hubungan (Sholihin & Ratmono, 2021:94). Untuk model non-linier menghasilkan *warped*, sedangkan model linier menghasilkan linier. Menurut Kock (2011) pemilihan algoritma berdasarkan teori. Jika teori menunjukkan model non-linier, algoritma yang dipilih dengan awalan *warp*. Pada penelitian ini, pemilihan algoritma X terhadap Y menggunakan algoritma *warp3* untuk menguji model non-linier. Algoritma linier untuk pengaruh X terhadap Z serta pengaruh Z terhadap Y.

Tabel 7. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	<i>Path coefficients</i>	<i>P-Value</i>	Model	Keterangan
X→Y	0.099	0.190	<i>Warped</i>	Tidak signifikan
X→Z	0.786	<0.001	Linier	Positif signifikan
Z→Y	0.261	0.008	Linier	Positif signifikan
X→Y dimediasi Z	0.205	0.005	-	Mampu memediasi secara signifikan

Sumber: Hasil olah data WarpPLS 7.0

Berdasarkan tabel 7, dapat disimpulkan bahwa:

- Path coefficients* desentralisasi fiskal (X) terhadap ketimpangan pendapatan daerah (Y) sebesar 0,099 dan nilai P sebesar 0,190. Hal ini berarti hubungan variabel laten tidak berpengaruh secara signifikan karena persyaratan *p-value* harus <0,05 meskipun model menunjukkan non-linier karena menghasilkan plot "*warped*".
- Path coefficients* desentralisasi fiskal (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar 0,786 dan nilai P sebesar <0,001. Hal ini berarti hubungan antar variabel laten berpengaruh secara positif signifikan.
- Path coefficients* pertumbuhan ekonomi (Z) terhadap ketimpangan pendapatan daerah (Y) sebesar 0,261 dan nilai P sebesar 0,008. Hal ini berarti hubungan antar variabel laten berpengaruh secara positif signifikan.
- Path coefficients* mediasi pertumbuhan ekonomi (Z) sebesar 0,205 dan nilai P sebesar 0,005. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi mampu mediasi desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Tipe efek mediasi adalah *indirect-only mediation*. Hal ini berarti pengaruh tidak langsung signifikan dan pengaruh langsung tidak signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 7, *path coefficients* sebesar 0,099 dengan *p-value* 0,190. Artinya hubungan antar variabel tidak memiliki pengaruh signifikan meskipun menunjukkan model non-linier dengan dibuktikan plot "*warped*". Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak berpengaruh pada ketimpangan pendapatan daerah. Desentralisasi fiskal sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan

pendapatan daerah tidak dapat dijadikan acuan sepenuhnya. Rata – rata kenaikan dan penurunan masing – masing indikator desentralisasi fiskal di setiap tahunnya tidak sama. Hasil ini sama dengan riset Roy et al. (2019) dan Khoirudin & Musta'in (2020) dimana ketimpangan pendapatan daerah tidak dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal.

Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung teorema desentralisasi Oates (1972) yang menyatakan bahwa di setiap level pemerintahan akan berupaya untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial dari daerahnya masing-masing dengan optimal yang dapat dilakukan dengan sistem desentralisasi fiskal. Untuk mencapai kesetaraan fiskal, pemerintah melaksanakan desentralisasi fiskal. Namun implementasi program tersebut tidak adanya peranan signifikan dalam meminimalkan ketimpangan pendapatan daerah (Khoirudin & Musta'in, 2020). Hasil ini tidak sama dengan penelitian Hung & Thanh (2022) yang dilakukan di negara Vietnam, dimana ketimpangan pendapatan daerah dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal dengan model non-linier. Oleh karena itu, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah dengan model non-linier tidak terbukti di Indonesia.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 7, *path coefficients* sebesar 0,786 dengan nilai $p < 0,001$. Artinya hubungan antar variabel berpengaruh positif signifikan. Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi fiskal yang dilakukan dengan optimal maka cenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin besar angka desentralisasi fiskal, tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga semakin besar. Hasil ini sama dengan riset Umasangadji et al. (2022) dan Adipura et al. (2022) dimana desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif signifikan. Hasil ini tidak sama dengan riset Dinarjito & Dharmazi (2020) dimana pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi desentralisasi fiskal secara signifikan.

Hasil riset ini mendukung teorema desentralisasi Oates (1972) dimana desentralisasi fiskal dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemakmuran masyarakat. Dalam produksi dan menyediakan barang publik, pemerintah daerah lebih baik dan efisien. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan daerahnya (Adipura et al., 2022). Penerimaan daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang direfleksikan dengan investasi pemerintah yang terdapat pada pos penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memanfaatkan tanah atau bangunan ataupun aset lainnya sebagai usaha bersama yang saling menguntungkan dengan badan usaha sektor publik (Pratama et al., 2021).

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 7, *path coefficients* sebesar 0,261 dengan *p-value* 0,008. Artinya hubungan antar variabel berpengaruh positif signifikan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi secara positif signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini sama dengan riset Triyono et al. (2021) dan Ridho & Wijayanti (2022) dimana ketimpangan pendapatan daerah dipengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik pada suatu daerah akan meningkatkan angka ketimpangan pendapatan daerah. Hasil ini tidak sama dengan riset Khoirudin & Musta'in (2020) dan Izzati et al. (2019) dimana ketimpangan pendapatan daerah tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi.

Hasil riset ini mendukung teori Kuznets (1955) yaitu pada laju pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Tingginya pertumbuhan ekonomi maka kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya semakin besar. Sektor padat modal tingkat kemajuannya lebih besar daripada sektor padat karya. Oleh karena itu, kontribusi sektor padat modal terhadap pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada sektor padat karya. Keadaan ini memperparah ketimpangan pendapatan daerah antara kelompok kaya dengan kelompok miskin (Ridho & Wijayanti, 2022).

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 7, *path coefficients* sebesar 0,205 dengan nilai P sebesar 0,005. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi mampu memediasi hubungan antar variabel. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini sama dengan penelitian Bojanic (2018) dimana pertumbuhan

ekonomi mampu memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Hasil ini tidak sama dengan riset Triyono et al. (2021) dimana pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah.

Hasil riset ini mendukung teorema desentralisasi Oates (1972) yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah sebagai pemelihara kepentingan publik akan berupaya memaksimalkan kesejahteraan sosial dari daerahnya masing-masing dengan optimal. Perbedaan sumber daya pada daerah akan menyebabkan perbedaan pendapatan. Program desentralisasi fiskal mampu menggerakkan perekonomian, yang akan mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bojanic, 2018). Desentralisasi dapat mempercepat pengambilan keputusan sehingga kinerja meningkat (Mustofa & Trisnaningsih, 2022). Implementasi dari desentralisasi fiskal ini menjadikan pemerintah dapat mengatur keuangannya sendiri. Selain itu, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk menggali ataupun mengoptimalkan potensi daerah yang dapat memberi kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan ketimpangan pendapatan. Pemerintah dapat membantu mengoptimalkan dan bekerjasama dengan suatu badan usaha. Kerjasama tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan modal kepada suatu badan usaha agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Hanifah et al., 2020).

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Implikasi dari penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal yang telah berjalan perlu dioptimalkan. Hal ini untuk mewujudkan pemerataan pendapatan daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Akan tetapi, juga mempunyai angka ketimpangan pendapatan tinggi.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak semua pemerintah provinsi dijadikan sebagai sampel penelitian. Hal ini dikarenakan data indeks gini tahunan tiap provinsi tidak tersedia secara lengkap. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ataupun mengganti indikator yang merefleksikan desentralisasi fiskal yang lebih berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Selain itu, agar lingkup penelitian lebih luas dapat menambahkan variabel independen yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan daerah.

Referensi

- Adipura, I. S., Rahayu, S., & Junaidi. (2022). The Effect of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Effectiveness and Efficiency on Economic Growth and Human Development Index as Intervening Variables (Empire Study on Regency/City Government in Jambi Province 2016-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 82–92. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/download/16267/14270>
- Alisjahbana, A., & Akita, T. (2020). Economic Tertiarization and Regional Income Inequality in a Decentralized Indonesia: A Bi-dimensional Inequality Decomposition Analysis. *Social Indicators Research*, 151(1), 51–80. <https://doi.org/10.1007/s11205-020-02374-z>
- Amalia, A. R., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Gerbangkertosusila). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 80–101. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1998>
- Bojanic, A. N. (2018). The Impact of Fiscal Decentralization on Growth, Inflation and Inequality in the Americas. *CEPAL Review*, 124, 57–77. <https://doi.org/10.18356/31c71be8-en>
- Bojanic, A. N., & Collins, L. P. A. (2021). Differential Effects of Decentralization on Income Inequality: Evidence from Developed and Developing Countries. In *Empirical Economics* (Vol. 60, Issue 4). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00181-019-01813-2>
- BPS. (2022a). *Gini Rasio*. Sirusa. <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/58/1/gini-rasio.html>
- BPS. (2022b). *Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2021-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html>

- BPS. (2022c). *Istilah*. Www.Bps.Go.Id.
https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=deskripsi_ind&Istilah_page=8
- BPS. (2022d). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2021. In *Berita Resmi Statistik* (Issue No. 08/01/Th. XXV).
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1747/gini-ratio-september-2019-tercatat-sebesar-0-380.html>
- Buana, A. L., Saragih, H. J. R., & Aritionang, S. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4(2), 1–20.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/315/0>
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 57–72.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>
- Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2013). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Spending versus Revenue Decentralization. *Economic Inquiry*, 51(4), 1915–1931.
<https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2012.00508.x>
- Hanifah, H., Kharisma, B., & Wardhana, A. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 23(2), 179–200. <https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.666>
- Haryanti, A. (2019). *Sistem Pemerintahan Daerah* (1st ed., Issue 1). Unpam Press.
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Threshold Effects of Fiscal Decentralization on Income Inequality: Evidence from Vietnam. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–26.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111851>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878/1622>
- Islamiah, N., Rahmatia, Paddu, H., & Zamhuri, M. Y. (2021). Intervensi Variabel Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Ekonomika*, 3(1), 1–16. <http://journal.lldikti9.id/Ekonomika>
- Izzati, A. N., Laut, L. T., & Hutajulu, D. M. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY Tahun 2010-2019. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 3(1), 69–86.
<https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/viewFile/2697/1096>
- Kasih, M. W. R., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869–11876.
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.565>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17–30.
<https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kock, N. (2011). Using WarpPLS in e-collaboration studies: Mediating effects, control and second order variables, and algorithm choices. *International Journal of E-Collaboration*, 7(3), 1–13.
<https://doi.org/10.4018/jec.2011070101>
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(01), 3–28. <https://www.jstor.org/stable/1811581>
- Mustofa, A. W., & Trisnaningsih, S. (2022). Studi Literatur: Peran Desentralisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 2(1), 28–35.
<https://doi.org/10.33005/senapan.v2i1.169>
- Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. *Problems of Economic Transition*.
<https://doi.org/10.2753/pet1061-1991391122>
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Mustofa, M. U. Al, & Muhammad, M. (2019). Studi Empiris Government Effectiveness dan Trade Openness terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 351–368. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.598>
- Pratama, L. S., Damanik, D., & Mispranoto. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 52–67.

- <http://jurnal.usi.ac.id/index.php/ekuilnominasi/article/view/120>
- Purbadharmaja, I. B. P., Maryunani, Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The Implications of Fiscal Decentralization and Budget Governance on Economic Capacity and Community Welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-05-2018-0052>
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (U. S. Hamidi & D. Puspita (eds.); 1st ed.). Badan Kebijakan Fiskal.
- Rachmawati, A. M., Wulandari, D., & Narmaditya, B. S. (2021). Financial Deepening and Income Inequality in Indonesia. *Global Business Review*, 22(1), 57–68. <https://doi.org/10.1177/0972150918811246>
- Rachmawati, D. (2021). Apakah pendapatan asli daerah (PAD) mendorong ketimpangan distribusi pendapatan di Yogyakarta? *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 831–838. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15720>
- Ramli, A., & Karmila, Y. (2022). Dampak Investasi Asing Langsung (FDI) di Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus : Sebelum dan Masa Covid-19). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 1285–1300. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1130>
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Pertumbuhan Rkonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>
- Rifai, A. D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 434–438. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.556>
- Roy, J., Lestari, D., & Busari, A. (2019). Measuring the impact of fiscal decentralization on economic growth and income inequality using the heuristic network. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(5), 1016–1024. <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1144.0585C19>
- Sari, R. P., Tjahjono, H., & Turino. (2018). Analysis of Financial Performance in Public Sector. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(01), 82–90. <http://jasf.upnjatim.ac.id/index.php/jasf/article/view/35>
- SDGs. (2017). *Apa itu SDGs*. <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>
- Sefira, M. V. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(03), 938–947. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/46304>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis* (1st ed.). Andi.
- Stegarescu, D. (2005). Public Sector Decentralisation: Measurement and International Trends. *Fiscal Studies*, 26(3), 301–333. https://doi.org/10.1007/3-7908-1670-1_2
- Sutapa, I. N., & Miati, N. L. P. M. (2018). Moderating Effect of Regional Original Revenue on the Influence of the Number of Tourists on Regional Revenue and Expenditure Budget. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 79–86. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.28>
- Taresh A. A., Sari, D. W., & Purwono, R. (2021). Analysis of the relationship between income inequality and social variables: Evidence from Indonesia. *Economics and Sociology*, 14(1), 103–119. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-1/7>
- Trisnarningsih, S., & Ariadi, D. (2022). Literature Review : Decentralization Analysis in Improving Managerial Performance. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 02(5), 884–888. <https://doi.org/10.36418/jrssem.v2i05.349>
- Triyono, Aryani, D., & Sasongko, N. (2021). The Effect of Fiscal Decentralization and Foreign Direct Investment on Regional Income Inequality : Economic Growth as A Mediating Variable. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3), 268–279. <https://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/17579>
- Umasangadji, A., Soamole, B., & Samiun, M. Z. M. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 39–67. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jepa/article/view/5304/3532>
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>